

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Pangkalan Bun 74112

Telp (0532) 21052 Fax (0532) 29002

Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.com

BAPP

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018. LKIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun juga mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalan Bun, 16 Januari 2019

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TTD

Drs. M. FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik yaitu dengan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulanan untuk mengetahui kendala permasalahan pencapaian target kinerja. Disamping itu pengendalian pencapaian target kinerja juga diukur menggunakan rujukan sesuai isi Permendagri 86 tahun 2017 (tabel VII. H.4) Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja. Adapun hasil capaian kinerja Bappeda tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja Bappeda tahun 2018 yaitu 89% dan mengalami peningkatan dibanding capaian kinerja tahun 2017 dan diartikan bahwa kinerja akhir menunjukkan **keberhasilan**.

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2017	Kinerja Tahun 2018		Kategori Capaian
		Realisasi	Target	Realisasi	
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	90%	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	90%	80 %	95 %	Sangat Berhasil
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang	87,5%	80 %	83 %	Berhasil

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2017	Kinerja Tahun 2018		Kategori Capaian
		Realisasi	Target	Realisasi	
kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)				

Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pencapaian target kinerja adalah :

1. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat desa dan kecamatan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up;
3. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya aplikasi perencanaan maupun pemanfaatan hasil kajian;
5. Belum menggunakan standar biaya dan analisa satuan harga dalam perencanaan sehingga kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur;
6. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
7. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
8. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.

Berangkat dari kendala atau hambatan yang dihadapi langkah-langkah perbaikan dalam rangka terwujudnya *good governance* adalah :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
3. Pengembangan sistem perencanaan berbasis ASB dan SSH;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur di seluruh segmen melalui diklat, bimbingan teknis, kaji banding, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi;
5. Peningkatan fasilitas dalam proses perencanaan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	2
1.4 Aspek Strategis	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	9
2.3 Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahunan	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	16
3.3 Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	
Lampiran	

B ^{AB I} PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsive dan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Adapun fungsi dari BAPPEDA adalah :

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);

- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir.

Jumlah aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Desember tahun 2018 berjumlah 39 orang dan mengalami kekosongan pejabat eselon IV sebanyak 2 (dua) orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	1
Sekretariat	-	1	1	6	8
Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	-	1	3	2	6
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	3	2	6
Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	1	3	1	5
Bidang Ekonomi	-	1	3	2	6
Bidang Sarana dan Prasarana	-	1	3	3	7
Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	16	16	39

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, BAPPEDA menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang di BAPPEDA bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi dalam rangka perencanaan dan pengendalian merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh BAPPEDA melalui Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah serta Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sarana dan Prasarana. Ketiga bidang tersebut bertugas mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk sekretariat BAPPEDA menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kondisi kepegawaian BAPPEDA berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Uraian	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	1
Sekretariat	-	4	3	1	8
Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	2	4	-	-	6
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	3	3	-	-	6
Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	4	-	1	5
Bidang Ekonomi	1	4	1	-	6
Bidang Sarana dan Prasarana	1	4	-	2	7
Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
Jumlah	8	23	4	4	39

Untuk mendukung kelancaran tugas, BAPPEDA dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Uraian	S1	SLTA	Jumlah
Tenaga Administrasi	1	-	1
Sopir	-	1	1
Tukang Kebun	-	2	2
Cleaning Service	-	2	2
Penjaga Malam	-	2	2
Jumlah	1	7	8

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan BAPPEDA yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 23 orang (58,97 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum.

Jumlah karyawan BAPPEDA yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 8 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 20,51% dari seluruh karyawan BAPPEDA, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Adapun daftar inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2018, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel terlampir

Saat ini BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 1 (satu) buah server yang memuat basis data sistem informasi perencanaan dan pengendalian daerah. Adapun basis sistem data informasi yang telah dibangun dan dikelola sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Pelaporan Daerah (siporda), dapat diakses melalui <http://203.130.214.218:90/siporda>; dan
2. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (simral), dapat diakses melalui <http://203.130.214.12/sikd>.

1.4 Aspek Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Bappeda

Struktur Organisasi Bappeda seperti pada bagan terlampir.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar ;

Ikhtisar Eksekutif ;

Daftar Isi ;

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi (struktur organisasi); Aspek Strategis dan permasalahan utama;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penjabaran visi-misi dengan menetapkan sasaran merupakan tugas besar dari masing-masing instansi Pemda dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pertahunnya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022, visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

**” GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 , maka Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis dan Renja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappeda akan berperan mendukung misi Bupati Kotawaringin Barat yang diintisarikan sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengolahan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis; dan

6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

2.1.2. Tujuan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Bappeda Kotawaringin Barat, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung tujuan pembangunan yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*) berbasis teknologi informasi. Dengan memperhatikan evaluasi kinerja dan konsistensi dokumen perencanaan, maka tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2018 akan disesuaikan dengan dokumen Renstra tahun 2017-2022.

Adapun tujuan Bappeda sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

Tujuan	Indikator
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.

2.1.3. Sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Bappeda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam dibawah ini:

Tabel 2.3. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)

Tabel 2.4 Target Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2017-2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80	80	80	90	90	90
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80	80	80	90	90	90
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80	80	80	90	90	90

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.5. Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui integrasi sistem informasi dalam sinkronisasi perencanaan, penganggaran, Pengendalian dan pelaporan	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah
		Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan
		Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
		Memperkuat sistem informasi data terpadu
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana
		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana
		Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan didaerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan

memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut

Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capain kinerja SKPD	80 %
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	80 %

2.3 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capain kinerja SKPD	80 %
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	80 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Tahun 2018 dengan realisasi pencapaiannya serta membandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017.

Penilaian dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengumpulan data capaian indikator kinerja bersumber dari penanggungjawab capaian indikator kinerja itu sendiri. Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja ditentukan dengan kategori penilaian berikut :

Tabel 3.1 Skala peringkat kerja

No.	Interval	Kategori Capaian
1.	Capaian \geq 91	Sangat berhasil
2.	$76 \leq$ Capaian \leq 90	Berhasil
3.	$66 \leq$ Capaian \leq 75	Cukup Berhasil
4.	$51 \leq$ Capaian \leq 65	Kurang Berhasil
5.	Capaian \leq 50	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik yaitu dengan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulanan untuk mengetahui kendala permasalahan pencapaian target kinerja. Disamping itu pengendalian pencapaian target kinerja juga diukur menggunakan rujukan sesuai isi Permendagri 86 tahun 2017 (tabel VII. H.4) Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja. Berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengukuran kinerja selama tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2017	Kinerja Tahun 2018		Kategori Capaian
		Realisasi	Target	Realisasi	
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	90%	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	90%	80 %	95 %	Sangat Berhasil
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan	87,5%	80 %	83 %	Berhasil

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2017	Kinerja Tahun 2018		Kategori Capaian
		Realisasi	Target	Realisasi	
pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)				

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja Bappeda tahun 2018 berada pada skala 76 – 90 yaitu 89% dan mengalami peningkatan dibanding capaian kinerja tahun 2017 dan diartikan bahwa kinerja akhir menunjukkan **keberhasilan**.

Adapun penjabaran untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan target kinerja sasaran strategis, menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran : **Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja menggunakan formula perhitungan rata-rata persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas = (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3)/3

Kriteria 1 :

Presentase SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dengan RPJMD

$$= \frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{38 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 100 \%$$

Kriteria 2 :

Presentase SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD =

$$= \frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{38 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 100 \%$$

Kriteria 3 :

Presentase keterisian data SIPD =

$$= \frac{\text{Jumlah keterisian data SIPD}}{\text{Jumlah data}} \times 100\%$$

$$\frac{70 \%}{100 \%} = 70 \%$$

Sehingga : (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3)/3

$$= (100 + 100 + 70)/3 = 90\%$$

2. Sasaran : **Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan**

Kualitas pelaksanaan perencanaan diukur dari kemampuan SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan dan direalisasikan. Sebagi acuan untuk penilaian diambil rata-rata nilai realisasi pencapaian dibawah 85 %.

Rata-rata presentase capaian kinerja SKPD =

$$= \frac{\text{Jumlah capain kinerja total SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{36 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 95 \%$$

3. Sasaran : **Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)**

Rata-rata pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana; ekonomi; sosial pemerintahan) =

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen bidang (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)}}{\text{Jumlah target dokumen}} \times 100\%$$

$$= \frac{10 \text{ dokumen}}{12 \text{ dokumen}} \times 100\% = 83 \%$$

Adapun hasil perhitungan diatas berdasarkan dari hasil capaian realisasi kinerja dari masing-masing capaian kegiatan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel berikut rincian capaian realisasi kinerja fisik Bappeda tahun 2018.

Tabel 3.3 Rincian Capaian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Satuan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Bidang Penelitian dan perencanaan daerah								
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakurataan perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	100	125,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	Dok	2	2	100,00	Sangat Berhasil
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	Keg	8	8	100,00	Sangat Berhasil

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Sat uan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
		Penetapan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP dan P-RKPDP	Dok	2	2	100,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	%	100	70	70,00	Cukup berhasil
		Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&penge mbangan pembangunan daerah	Kali	4	4	100,00	Sangat Berhasil
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%	80	95	118,42	Sangat Berhasil
		Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	Lap	12	12	100,00	Sangat Berhasil
		Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Apli kasi	2	2	100,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Lap	5	5	100,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Lap	4	4	100,00	Sangat Berhasil
Bidang Sarana dan Prasarana								
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Prosentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasaranaa yang dimanfaatkan dalam pengambil kebijakan	%	80	100	125,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang prasarana perhubungan dan infrastruktur	Dok	1	1	100,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dok	1	1	100,00	Sangat Berhasil

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Sat uan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
		Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Dok	1	1	100,00	Sangat Berhasil
Bidang Ekonomi								
		Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	75	93,75	Berhasil
		Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	Dok	1	1	100,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	Dok	1	1	100,00	Sangat Berhasil
		Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Dok	2	2	100,00	Sangat Berhasil
Bidang Sosial Pemerintahan								
		Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	80	100,00	Berhasil
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Dok	2	2	100,00	Sangat Berhasil
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	Dok	2	2	100,00	Sangat Berhasil



No.	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Sat uan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Dok	1	1	100,00	Sangat Berhasil

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini berisi uraian hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2018 dan capaian kinerja tahun 2017 pada setiap sasaran yang telah dijabarkan pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. Evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, permasalahan yang dihadapi, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Rumus yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja strategis berdasarkan hasil kinerja capaian kegiatan disini adalah persentase antara realisasi kinerja yang tercapai dengan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja tahun 2018.

Untuk penjelasan masing-masing pencapaian target kinerja Bappeda Tahun 2018 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : **Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah**

Capaian indikator sasaran melebihi target dengan persen (%) realisasi sebesar 83 persen dari target 80 persen. Program yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan capaian kinerja 100% diperoleh dari hasil perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah dokumen tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{6 \text{ dokumen}}{6 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100 \%$$

Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Target	Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
				2017	2018		
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	90%	100%	125,00	Sangat Berhasil

Beberapa dokumen perencanaan yang dimanfaatkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah yang dimanfaatkan, yaitu :

- Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Wilayah;
- Dokumen Penyusunan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan SDA;
- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kab. Kobar;
- Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
- Data SIPD; dan
- Dokumen RTRW Kab. Kobar.

Kegiatan pendukung pencapaian target tersebut adalah :

- a. Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	75	100	70	70,00	Cukup berhasil

Pengukuran capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah keterisian elemen data pada aplikasi SIPD yaitu :

$$= \frac{770 \text{ elemen}}{1100 \text{ elemen}} \times 100\% = 70 \%$$

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini menurun dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dikarenakan keterisian data SIPD lebih sedikit terisi karena keterbatasan data serta kewenangan penginformasian data. Berikut dijabarkan beberapa hasil analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2018 :

- Hambatan/kendala :
 1. Jenis data yang dibutuhkan tidak seluruhnya tersedia dan ada data merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
 2. Terkendala pada proses penginputan data pada sistem. Setiap dilakukan penginputan data secara online, sistem aplikasi selalu loading. Sesuai informasi dari pengelola SIPD pusat diperoleh penjelasan server tidak mampu menampung proses input data yang dilakukan oleh SKPD kab/kota maupun provinsi se indonesia. Hal ini mengakibatkan data tidak muncul dan tidak dapat dicetak.

- Strategi pemecahan masalah :
Untuk memenuhi target tersediannya dokumen, input data dilakukan secara manual dan keterisian data dimaksimalkan berdasarkan ketersediaan data kabupaten.
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
42.000.000,00	41.316.084,00	683.912,00	1,63%

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian& pengembangan pembangunan daerah	-	4 kali	4 kali	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018 Berikut dijabarkan beberapa hasil analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2018 :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Atensi seluruh SKPD dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
- Hambatan/kendala :
Pengembangan khususnya dibidang teknologi informasi masih bergantung kepada tenaga ahli dari pihak ke tiga
- Strategi pemecahan masalah :
Perlu komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan khususnya di bidang teknologi informasi.
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
41.300.000,00	39.956.070,00	1.343.930,00	3,25%

c. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD dan Kegiatan Penetapan RKPD

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(output)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00	Sangat Berhasil
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	8 Keg	8 Keg	8 Keg	100,00	Sangat Berhasil
Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini menunjukkan konsistensi hasil. Berikut dijabarkan beberapa hasil analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2018 :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses perencanaan tepat waktu yang didukung oleh ketersediaan aplikasi perencanaan dan ketersediaan sumber daya yang menguasai bisnis proses aplikasi SIMRAL
- Hambatan/kendala :
Masih rendahnya peran aktif serta koordinasi SKPD dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target. Efisiensi anggaran didapat dari penghematan honor narasumber dan honor tim kerja. Pembayaran honor tim kerja karena kegiatan ini termasuk dalam aktivitas harian pegawai yang telah masuk dalam perhitungan tunjangan tambahan penghasilan setiap bulannya.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
219.838.000,00	204.565.700,00	15.272.300,00	6,95%

2. Sasaran : **Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan**

Capaian indikator sasaran melebihi target dengan persen (%) realisasi sebesar 95 persen dari target 80 persen. Tolak ukur dari penilaian capaian kinerja total SKPD adalah pencapaian/kemampuan SKPD dalam melakukan pelaksanaan kegiatan/serapan anggaran diatas 85 persen.

Program yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diperoleh dari hasil perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah capain kinerja total SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{36 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 95 \%$$

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program(outcome)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
Terpenuhnya kualitas pelaksanaan perencanaan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	90%	80%	95%	118,42%	Sangat Berhasil

Kegiatan pendukung pencapaian target tersebut adalah :

a. Kegiatan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(output)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	-	12 Lap	12 Lap	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Berikut dijabarkan beberapa hasil analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2018 :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses pelaporan realisasi kinerja perbulan oleh masing-masing SKPD tepat waktu.
- Hambatan/kendala :
Keakuratan data atau konsistensi data antara target dan realisasi masih belum sinkron
- Strategi pemecahan masalah :
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja daerah
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
166.450.000,00	163.721.125,00	2.728.875,00	1,64%

b. Kegiatan Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100,00	Sangat Berhasil

Output dari kegiatan tahun 2018 adalah tersediannya aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Daerah (SIPORDA) dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), sedangkan untuk tahun 2017 adalah aplikasi Siporda dan aplikasi Sisrenbangda. Pengembangan aplikasi Sisrenbangda tahun 2018 tidak dilaksanakan, karena Pemkab Kobar telah berkomitmen untuk melaksanakan proses perencanaan-penganggaran yang konsisten dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi Simral. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sesuai kebutuhan dan tersediannya SDM yang mampu mengoperasionalkannya.
- Hambatan/kendala :
Keterbatasan SDM dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem yang dimiliki.
- Strategi pemecahan masalah :
Penyediaan SDM sesuai bidang keahlian dalam rangka pengamanan serta pengembangan sistem yang dimiliki.
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target. Efisiensi anggaran didapat dari penghematan pembayaran akomodasi tenaga ahli, akibat pemanfaatan jasa tenaga ahli lokal.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
255.400.000,00	223.200.000,00	32.200.000,00	12,61%

c. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	-	5 Lap	5 Lap	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Output dari kegiatan adalah :

1. Laporan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
2. Laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah
3. Laporan pelaksanaan monev
4. Laporan evaluasi triwulanan pelaksanaan pembangunan daerah
5. Laporan evaluasi semesteran pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Berikut dijabarkan beberapa hasil analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2018 :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses pelaporan realisasi kinerja perbulan oleh masing-masing SKPD tepat waktu.
- Hambatan/kendala :
Keakuratan data atau konsistensi data antara target dan realisasi masih belum sinkron
- Strategi pemecahan masalah :
Melakukan koordinasi dan validasi keakuratan data capaian kinerja serta sinkronisasi data antara target dalam dokumen perencanaan terhadap realisasi capaian kinerja.
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
94.250.000,00	93.100.785,00	1.149.215,00	1,22%

d. Kegiatan Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dok	4 Lap	4 Lap	100,00	Sangat Berhasil

Hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2017 dan 2018 adalah jumlah output kegiatan yang dihasilkan, dimana tahun 2017 kegiatan ini hanya berfokus menghasilkan dokumen LKPJ. Adapun output dari kegiatan tahun 2018 adalah :

1. LKPJ,
2. Laporan pelaksanaan DAK,
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Perbantuan dan
4. Laporan Pelaksanaan Dana Desa

Berikut dijabarkan beberapa hasil analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2018 :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Proses penyusunan tepat waktu serta SKPD berperan aktif dalam pengumpulan dan validasi data hasil capaian kinerja SKPD.
- Hambatan/kendala :
Keakuratan data atau konsistensi data antara target dan realisasi masih belum sinkron.
- Strategi pemecahan masalah :
Melakukan koordinasi dan validasi keakuratan data capaian kinerja serta sinkronisasi data antara target dalam dokumen perencanaan terhadap realisasi capaian kinerja.
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
39.649.600,00	39.144.000,00	505.600,00	1,28%

3. Sasaran : **Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)**

Capaian indikator sasaran melebihi target dengan persen (%) realisasi sebesar 83 persen dari target 80 persen. Tolak ukur dari penilaian indikator tersebut adalah Rata-rata pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana

prasarana; ekonomi; sosial pemerintahan) dengan target 12 dokumen dan realisasi 10 dokumen.

Program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain :

Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Prosentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana-prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%	80%	100%	125,00	Sangat Berhasil

Capaian kinerja program diperoleh dari hasil perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah dokumen tersedia}} \times 100\%$$

$$\frac{3 \text{ dokumen}}{3 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan pendukung pencapaian target adalah :

- a. Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian	Kategori Capaian
Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang prasarana perhubungan dan infrastruktur	Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Tahun 2017 adalah kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah dengan capaian kinerja 1 dokumen. Karena terjadi perubahan nomenklatur kegiatan yang pada dasarnya adalah sama. Adapun output kegiatan berupa dokumen Strategi Sanitasi. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Kerjasama yang baik dari beberapa SKPD teknis dalam penyediaan data-data teknis

- Hambatan/kendala :
Data dan informasi beragam
- Strategi pemecahan masalah :
Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam aplikasi SIPD
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
44.775.000,00	44.099.544,00	675.456,00	9,59%

b. Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	1	1	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Adapun output kegiatan berupa dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL). Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Kerjasama yang baik dari beberapa SKPD teknis dalam penyediaan data-data teknis
- Hambatan/kendala :
Data dan informasi beragam
- Strategi pemecahan masalah :
Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam aplikasi SIPD
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
42.300.000,00	42.234.150,00	65.850,00	0,16%



c. Kegiatan Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(output)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	-	1	1	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Adapun output kegiatan berupa dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kobar (Perda RTRW no. 1 Tahun 2018). Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Kerjasama yang baik antar lembaga legislatif dengan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan Perda
- Hambatan/kendala :
Panjangnya proses kesepakatan bersama terhadap substansi dokumen perda berakibat pada kualitas data
- Strategi pemecahan masalah :
Segera dilakukan pemutakhiran data
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
52.470.000,00	52.363.481,00	106.519,00	0,2%

Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Program	Indikator Kinerja Program(outcome)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	60%	80%	75%	93,75	Berhasil

Capaian kinerja program diperoleh dari hasil perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah dokumen tersedia}} \times 100\%$$

$$\frac{3 \text{ dokumen}}{4 \text{ dokumen}} \times 100\% = 75 \%$$

Beberapa dokumen perencanaan bidang ekonomi yang tersedia adalah:

1. Dokumen analisis perumusan perencanaan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Dokumen analisis perumusan perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan daerah melalui penguatan iklim Investasi;
3. Dokumen analisis perumusan perencanaan pembangunan sektor pariwisata;
4. Dokumen hasil pelaksanaan monev.

Dari 4 dokumen yang tersedia, hanya 3 dokumen yang dimanfaatkan dalam proses arahan penentuan kebijakan daerah, karena dokumen hasil monev kurang kuat dalam menginformasikan data. Hasil analisis perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat 15% dilakukan perbaikan kinerja.

Kegiatan pendukung pencapaian target adalah :

- a. Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	-	1 Dok	1 Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Adapun output kegiatan berupa Dokumen analisis perumusan perencanaan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Kerjasama yang baik dari beberapa SKPD teknis dalam penyediaan data-data teknis
- Hambatan/kendala :
Data dan informasi beragam
- Strategi pemecahan masalah :
Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam aplikasi SIPD

- Efisiensi penggunaan sumber daya :

Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target tidak ditemukan, karena anggaran digunakan sepenuhnya dalam rangka pencapaian target kinerja.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
22.000.000,00	21.999.984,00	0	0%

- b. Kegiatan Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(output)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	-	1 Dok	1 Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Adapun output kegiatan berupa Dokumen Dokumen analisis perumusan perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan daerah melalui penguatan iklim Investasi. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Kerjasama yang baik dari beberapa SKPD teknis dalam penyediaan data-data teknis
- Hambatan/kendala :
Data dan informasi beragam
- Strategi pemecahan masalah :
Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam aplikasi SIPD
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
22.000.000,00	21.987.563,00	12.437,00	0,06%

c. Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan , koperasi dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	-	2 Dok	2Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Adapun output kegiatan berupa Dokumen Dokumen analisis perumusan perencanaan pembangunan sektor pariwisata dan dokumen hasil pelaksanaan moneyv. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Kerjasama yang baik dari beberapa SKPD teknis dalam penyediaan data-data teknis
- Hambatan/kendala :
Data dan informasi beragam
- Strategi pemecahan masalah :
Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam aplikasi SIPD
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target tidak ditemukan, karena anggaran digunakan sepenuhnya dalam rangka pencapaian target kinerja.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
56.500.000,00	56.500.000,00	0	0%

Program Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan

Program	Indikator Kinerja Program(<i>outcome</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	80%	80%	100,00	Berhasil

Capaian kinerja program diperoleh dari hasil perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah dokumen tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{4 \text{ dokumen}}{5 \text{ dokumen}} \times 100\% = 80 \%$$

Beberapa dokumen perencanaan bidang Sosial Pemerintahan yang tersedia adalah:

1. Dokumen pengembangan data dan pemetaan pendidikan
2. Dokumen perencanaan pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
3. Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah
4. Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan kesehatan
5. Dokumen monev

Dari 5 dokumen yang tersedia, hanya 4 dokumen yang dimanfaatkan dalam proses arahan penentuan kebijakan daerah, karena dokumen hasil monev kurang kuat dalam menginformasikan data.

Kegiatan pendukung pencapaian target adalah :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	-	2 Dok	2 Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Peran aktif SKPD dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Hambatan/kendala :
Proses penyusunan yang melibatkan beberapa SKPD teknis dengan pemahaman berbeda sehingga memerlukan perhatian khusus
- Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan laporan



- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target. Efisiensi anggaran dari sisa lelang kegiatan belanja modal kajian akademik dokumen perencanaan

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
217.050.000,00	214.178.863,00	2.871.137,00	1,32%

b. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	1 Dok	1 Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Peran aktif SKPD dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Hambatan/kendala :
Proses penyusunan yang melibatkan beberapa SKPD teknis dengan pemahaman berbeda sehingga memerlukan perhatian khusus
- Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan laporan
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target tidak ditemukan, karena anggaran digunakan sepenuhnya dalam rangka pencapaian target kinerja.

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
58.900.000,00	58.900.000,00	0	0%

c. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(<i>output</i>)	Capaian 2017	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Kategori Capaian
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	-	2 Dok	2 Dok	100,00	Sangat Berhasil

Hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan ini tidak dapat dilakukan perbandingan hasil capaian, karena kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2018. Berikut beberapa hasil analisis keberhasilan pencapaian target kinerja :

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target :
Peran aktif SKPD dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Hambatan/kendala :
Proses penyusunan yang melibatkan beberapa SKPD teknis dengan pemahaman berbeda sehingga memerlukan perhatian khusus
- Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan pemahaman akan pentingnya koordinasi dalam penyusunan laporan
- Efisiensi penggunaan sumber daya :
Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan anggaran terhadap pencapaian target. Efisiensi anggaran dari sisa lelang kegiatan belanja modal kajian akademik dokumen perencanaan

Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
239.400.000,00	235.860.955,00	3.539.045,00	1,48%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di jabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 28 Desember 2017 serta Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Total dukungan biaya kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 10.250.099.000,- dengan rincian belanja langsung (BL) sebesar Rp. 5.252.070.000,- dan belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 4.998.029.000,-. Adapun rincian khusus terkait urusan disajikan pada tabel berikut:

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.998.029.000,-	4.889.597.055	97,83
2.	Belanja Langsung	5.252.070.000,-	4.937.763.985	94,02

Pagu Anggaran definitive tahun 2018 sebesar Rp. 5.252.070.000 (*Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 350.598.200,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.419.210.800,-
- Belanja Modal Rp. 2.482.270.000,-

Realisasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar 4.937.763.985,- (*Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*). Atau sebesar 94,02%, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 292.235.300,- (83,35 %)
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.254.998.555,-(93,21 %)
- Belanja Modal Rp. 2.390.530.130,- (96,30 %)

Tabel 3.4. Rincian Realisasi Anggaran per kegiatan TA 2018

No.	Program/ Kegiatan	Input		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan Realisasi	(%)
BAPPEDA		5.252.070.000	4.937.763.985	94,02
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.070.270.800	987.934.197	92,31
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	0	0
b.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	269.682.400	200.066.238	74,19
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.300.000	3.931.500	62,40
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	217.694.000	170.851.119	78,48
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	144.105.000	144.105.000	100,00
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	41.950.000	39.675.000	82,66
g.	Penyediaan alat tulis kantor	58.472.000	58.472.000	100,00

No.	Program/ Kegiatan	Input		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Realisasi	(%)
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.190.000	32.190.000	100,00
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.930.000	9.930.000	100,00
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	222.500.000	206.657.400	92,88
k.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.200.000	16.755.000	97,41
l.	Penyediaan makanan dan minuman	2.250.000	2.250.000	100,00
m.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	312.500.000	312.342.089	99,95
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.003.844.000	1.905.327.930	95,08
a.	Pembangunan Gedung kantor	1.560.050.000	1.506.892.400	96,59
b.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	133.300.000	117.981.330	88,51
c.	Pengadaan Mebeleur	178.820.000	177.324.000	99,16
d.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	71.500.000	44.330.000	62,00
e.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	43.044.000	42.827.000	99,50
f.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	9.130.000	8.705.000	95,35
g.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatagedung kantor	3.000.000	2.667.800	88,93
h.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	4.600.000	92,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	56.600.000	56.600.000	100
a.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	6.000.000	6.000.000	100,00
b.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.300.000	25.300.000	100,00
c.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	25.300.000	25.300.000	100,00
4.	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	20.000.000	19.972.666	99,86
a.	Pemulangan Pegawai yang pensiun	20.000.000	19.972.666	99,86
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	203.000.000	195.245.439	96,18
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	203.000.000	195.245.439	96,18
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.270.000	15.264.300	99,96
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	450.000	450.000	100,00
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	225.000	225.000	100,00
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	14.595.000	14.589.300	99,96
7.	Program Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	303.138.000	285.837.854	94,29
a.	Penyusunan rancangan RKPD	19.500.000	19.500.000	100,00
b.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	152.663.000	151.065.700	98,95
c.	Penetapan RKPD	47.675.000	34.000.000	71,32

No.	Program/ Kegiatan	Input		
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Realisasi	(%)
d.	Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	42.000.000	41.316.084	98,37
e.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan	41.300.000	39.956.070	96,75
8.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	555.749.600	519.185.910	93,42
a.	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	166.450.000	163.721.125	98,36
b.	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	255.400.000	223.200.000	87,39
c.	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	94.250.000	93.100.785	98,78
d.	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	39.649.600	39.144.000	98,72
9.	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	143.545.000	138.697.175	96,62
a.	Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	48.775.000	44.099.544	90,41
b.	Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	42.300.000	42.234.150	99,84
c.	Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	52.470.000	52.363.481	99,80
10.	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100.500.000	100.487.547	99,99
a.	Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	22.000.000	21.999.984	100,00
b.	Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	22.000.000	21.987.563	99,94
c.	Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	56.500.000	56.500.000	100,00
11.	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	515.350.000	508.939.818	98,76
a.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	217.050.000	214.178.863	98,68
b.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	239.400.000	235.860.955	98,52
c.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	58.900.000	58.900.000	100

Tabel 3.5.
Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2018

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Pegawai	4.998.029.000,-	4.889.597.055,-	97,83
Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	350.598.299,-	292.235.300,-	83,35
2	Belanja Barang/Jasa	2.419.210.800,-	2.254.998.555,-	93,21
3	Belanja Modal	2.482.270.000,-	2.390.530.130,-	96,30
TOTAL BELANJA (BL+BTL)		10.250.099.000,-	9.827.361.040,-	95,87

Berdasarkan besar penyerapan dana sebagaimana dijelaskan di atas, sebesar 3,99 % dari alokasi dana untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, atau tercapai sisa lebih sebesar Rp. 405.074.960,- (*Empat Ratus Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh rupiah*), yang disebabkan :

1. Kelebihan anggaran pada rekening belanja pegawai;
2. Tidak terealisasi belanja pemeliharaan server dan mesin cetak;
3. Tidak terealisasi penyediaan tambahan tenaga kontra daerah di kantor Bappeda;
4. Tidak dilakukan realisasi honor tim pada kegiatan Penetapan RKPD;
5. Tidak optimal penyerapan anggaran belanja bahan bakar minyak dan pelumas sebagai dampak kebijakan Pemda pemberian tunjangan mobilitas bagi pejabat eselon;
6. Sisa lebih anggaran lainnya adalah penghematan belanja akibat negosiasi harga.

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya.

Berkaitan dengan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi, yakni :

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

Sepanjang tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan **capaian kinerja berhasil**.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya dalam pencapaian target – target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN DOKUMEN :

- Indikator Kinerja Utama
- SOP Penyusunan LAKIP
- SOP
- Struktur Organisasi
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kerja Tahun 2018
- Tabel pengendalian evaluasi Tahun 2018
- Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan

